

Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pascareformasi

Gonda Yumitro*
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: yumitro@gmail.com

Abstract

This article elaborates the opportunities and challenges of the Islamic revivalist movement in post-reform Indonesia since the opportunity to express the notions is opened. The issue of revivalism is not only developed in Indonesia, but also an important issue in Southeast Asia, South Asia, Middle East, and other regions. This can be seen from various studies on Islamic revivalism that occurred in various areas. Even the Islamic revivalism was actually initiated at the end of the nineteenth century by Jamaluddin al-Afghani, whose passion was continued by his disciple Muhammad Abduh. The author will explain how the challenge of the rise of Islam in Indonesia after the reformation. Therefore, the author provides a study of literature and interviews with the experts consisted of 10 people of scholars and activists of Islamic revivalism movement conducted. Based on this research, there is an indication that the Islamic revivalism movement has great opportunities and challenges in post-Indonesian reformation. Some of the opportunities for the development of Islamic revivalism movement in Indonesia are the historical factor, acculturation through educational institutions, and the Islamization policies in some regions. On the other hand, the challenges found are the challenges of public opinion, the lack of optimal tools for multicultural dialogue, the decline of political support, the conflict among Muslims, the lack of professionalism, and the secularism. Regarding these conditions, some of the Islamic revivalism movements adapted themselves to adjust political developments in Indonesia.

Keywords: Revivalism, Islam, Indonesia, Reformation, Politic

* Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Kampus III, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur. Telp. (+62 341) 464 318 Fax: (+62 341) 460 435.

Abstrak

Artikel ini mengelaborasi peluang dan tantangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia pascareformasi mengingat ruang keterbukaan berekspresi dan berpendapat yang semakin terbuka. Isu revivalisme tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga merupakan isu penting di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Hal ini bisa terlihat dari berbagai penelitian tentang revivalisme Islam yang terjadi di berbagai kawasan tersebut. Bahkan revivalisme Islam sebenarnya sudah diinisiasi pada akhir abad ke-19 oleh Jamaluddin al-Afghani, yang semangatnya ini pun diteruskan oleh muridnya yang bernama Muhammad Abduh. Penulis akan menjelaskan tentang bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan revivalisme Islam di Indonesia pascareformasi. Untuk itu, dilakukan penelitian studi pustaka dan wawancara terhadap para pakar yang menguasai kajian ini sebanyak 10 orang responden ilmuwan dan aktifis gerakan revivalisme Islam. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan indikasi bahwa gerakan revivalisme Islam mempunyai peluang sekaligus tantangan yang besar pascareformasi. Di antara beberapa peluang perkembangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia adalah faktor sejarah, akulturalisasi melalui lembaga pendidikan, dan Islamisasi kebijakan. Adapun tantangan yang ditemukan adalah tantangan opini publik, belum optimalnya sarana dialog kebhinnekaan, penurunan dukungan politik, perpecahan umat Islam, profesionalisme gerakan revivalisme Islam, dan sekularisme. Merespons kondisi tersebut maka terlihat bahwa gerakan revivalisme Islam mengalami pergeseran gerakan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik di Indonesia.

Keywords: Revivalisme, Islam, Indonesia, Reformasi, Politik

Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia merupakan kesempatan bagi berbagai gerakan, tidak ketinggalan revivalisme Islam untuk menunjukkan eksistensi mereka. Hal ini dikarenakan era reformasi memberikan kesempatan untuk berekspresi yang lebih luas di tengah masyarakat. Pascatumbangnya rezim orde baru dibawa komando Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun, berbagai gerakan revivalisme Islam muncul dan berkembang di Indonesia.

Isu revivalisme tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga merupakan isu penting di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Hal ini bisa terlihat dari berbagai

penelitian tentang revivalisme Islam yang terjadi di berbagai kawasan tersebut. Bahkan revivalisme Islam sebenarnya sudah diinisiasi pada akhir abad ke-19 oleh Jamaluddin al-Afghani, yang semangatnya inipun diteruskan oleh muridnya yang bernama Muhammad Abduh.¹ Dengan gambaran tersebut, Berger menyebutkan bahwa gerakan revivalisme merupakan salah satu isu gerakan sosial yang paling penting dan fenomenal dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara pada abad ke-20.²

Ahmad F. Yousif mendefinisikan revivalisme Islam sebagai suatu upaya pemurnian Islam agar betul-betul kembali kepada sumbernya yang murni.³ Dengan cara ini diyakini bahwa Islam akan kembali kepada kejayaannya. Seyyed Vali Reza Nasr secara umum menjelaskan bahwa revivalisme Islam sebagai suatu gerakan revolusioner yang bertujuan untuk menerapkan aturan di dunia Islam, baik secara otoriter maupun demokratis.⁴ Oleh karena itu, muatan dakwah sangat kental dalam gerakan revivalisme Islam yang tidak hanya dimaknai dalam artian politik melainkan juga dalam bentuk sosial budaya.

Revivalisme Islam di Indonesia bukanlah hal baru, namun sudah dimulai sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan, para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan tersebut tidak sedikit dari para ulama yang berhasil membakar semangat rakyat. Karena itu pula, ketika kemerdekaan berhasil diraih, upaya untuk menguatkan identitas keislaman terlihat dalam landasan bangsa Indonesia pada UUD 1945 dan Pancasila. Bahkan pada waktu itu, sempat muncul keinginan untuk menguatkan identitas keislaman dengan penegakan syariat Islam bagi pemeluknya, sebagaimana sila pertama Pancasila yang kemudian direvisi.

Bukti berkembangnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia bisa terlihat dari berbagai pengaruhnya yang terjadi di tengah masyarakat. Saat ini, dengan mudah bisa ditemukan kelompok masyarakat yang menggunakan berbagai identitas keislaman. Banyak wanita-wanita yang sudah berjilbab, masjid-masjid mulai dipenuhi oleh berbagai aktivitas keagamaan, termasuk ucapan salam yang sudah sedemikian mudah dan umum disampaikan oleh masyarakat

¹ Syaifulloh Yazid, "Melacak Proyek Revivalisme dalam Gerakan Fundamentalisme Islam," *KALAM* 11, no. 1 (June 30, 2017): 57–84, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.1079>.

² Peter L. Berger, "The Desecularization of the World: A Global Overview, w: The Desecularization of the World," *Resurgent Religion and World Politics*, 2005, 1–18.

³ Ahmad F. Yousif, "Islamic Revivalism in Malaysia: An Islamic Response to Non-Muslim Concerns," *American Journal of Islamic Social Sciences* 21, no. 4 (2004): 30–56.

⁴ Seyyed Vali Reza Nasr, "Democracy and Islamic Revivalism," *Political Science Quarterly* 110, no. 2 (1995): 261–285.

dalam keseharian mereka. Hal ini paling tidak secara sosial budaya menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, pada aspek yang lain tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat justru bersikap berseberangan terhadap gerakan revivalisme ini. Mereka menganggap revivalisme Islam identik dengan gerakan radikal. Sikap semacam ini bisa terjadi karena faktor politik ataupun pemahaman yang kurang baik tentang radikalisme. Sebagian masyarakat justru menyamakan definisi fundamentalisme dengan radikalisme.

Pada akhirnya, secara perlahan terjadi pergeseran makna yang juga memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam menghadapi perkembangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia, khususnya yang menggunakan cara-cara moderat. Masyarakat memandang revivalisme sebagai satu kesatuan, sehingga pandangan mereka terhadap fundamentalisme agama menjadi satu kesatuan yang diidentikkan dengan radikalisme.

Atas dasar itu, artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan revivalisme Islam di Indonesia pascareformasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa pakar yang menguasai kajian gerakan sosial dan politik Islam dan beberapa aktivis gerakan revivalisme Islam di Malang Raya. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Selain itu, supaya penjelasan menjadi lebih lengkap dan sistematis, serta mudah dipahami, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang konsep revivalisme Islam.

Konsep Revivalisme Islam

Revivalisme seringkali disebut sebagai *resurgence*, *re-awakening*, *revitalization*, dan sejenisnya yang bermakna kebangkitan atau kemunculan kembali. Secara bahasa revivalisme diartikan sebagai keinginan untuk kembali kepada dasar pemahaman dan pengajaran Islam karena telah terjadi kesalahan yang membuat umat Islam mengalami kemunduran. Esposito menambahkan bahwa revivalis menilai bahwa telah terjadi kesalahan dalam sejarah umat Islam karena adanya pengaruh asing.⁵ Hal ini menunjukkan lahirnya kesadaran di

⁵John L. Esposito, "Islam and Political Violence," *Religions* 6, no. 3 (September 2015): 1067–81, <https://doi.org/10.3390/rel6031067>.

kalangan Muslim akan prinsip dasar dalam Islam sehingga memerlukan pemahaman ulang (purifikasi dan *tajdid*) nilai-nilai keislaman yang dipahami dalam al-Qur'an dan sunnah, sebagai bentuk respons atas berbagai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Islamic revivalism seringkali diidentikkan dengan fundamentalisme Islam. Padahal term *fundamentalism* berasal dari pengalaman Barat ketika kelompok Kristen menginginkan mereka kembali ke dasar ajaran agama wahyu. Dalam perkembangannya, fundamentalisme ini dimaknai sebagai patologi budaya karena keinginan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional yang disebabkan oleh perasaan tidak aman akibat tekanan (dalam kasus Muslim) atau keinginan untuk melakukan hegemoni (pada masyarakat Barat yang membawa semangat gospel dalam kolonialisme).

Identifikasi di atas tidak sepenuhnya benar, karena revivalisme Islam bukan merupakan gerakan monolitik, sebagaimana fundamentalisme yang seringkali menyita perhatian publik. Namun ada banyak varian dalam gerakan ini termasuk dalam hal pemikiran dan gerakan sosial kemasyarakatan dan politik. Karenanya, meskipun tidak selalu benar, revivalisme Islam seringkali berdekatan dengan politik Islam sebagaimana didefinisikan oleh Anis Rasyid Baswedan sebagai upaya untuk mempromosikan aspirasi umat Muslim dengan berbagai agenda Islam ke dalam kebijakan hukum dan pemerintahan.⁶

Pada dunia Islam, revivalisme Islam muncul sebagai gerakan defensif dalam bidang sosial dan politik sebagai reaksi dari westernisasi, manipulasi asing, dan berbagai krisis atau persoalan serius domestik. Artinya secara sederhana, revivalisme Islam disebabkan oleh faktor eksternal dan domestik. Dalam aspek eksternal, globalisasi dan kolonialisme menjadi dua kata kunci yang tidak terpisahkan dengan revivalisme Islam. Di satu sisi, globalisasi yang didasari oleh semangat liberalisme dan modernisme, telah membuat dunia menjadi *unequal*, atau dalam istilah Marxis, kelompok kapital telah menikmati *surplus values*, di mana kapital bisa diidentikkan dengan Barat, dan buruh adalah dunia Islam yang notabene menjadi sumber produksi dalam artian SDA dan SDM, serta pasar yang produktif. Globalisasi dinilai tidak lebih dari media yang melanggengkan neo-kolonialisme sebagai bentuk dominasi Barat terhadap dunia Islam.

⁶ Anis Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory," *Asian Survey* 44, no. 5 (2004), 669–690.

Lebih lanjut, pengalaman kolonialisme di masa lalu telah menyebabkan munculnya suatu keadaan yang disebut sebagai poskolonialisme, yaitu saat Barat senantiasa merasa lebih superior pada berbagai aspek dibandingkan dunia Islam (kawasan kolonial), apalagi *renaissance* dan *enlightenment* dinilai berasal dari peradaban mereka, terutama Yunani kuno.⁷ Sementara di sisi lain, globalisasi menyebabkan gerakan dan komunikasi umat Islam untuk berkomunikasi satu dengan lainnya menjadi lebih mudah, sehingga memperlancar komunikasi antara satu gerakan dengan gerakan revivalisme Islam lainnya. Perasaan terdiskriminasi memunculkan solidaritas dan kerja sama yang intensif atas dasar persaudaraan sesama Muslim.

Revivalisme Islam semakin meningkat karena dalam faktanya, kondisi domestik tidak lebih menggembirakan. Muncul perasaan hampa dan kecewa dengan perkembangan masyarakat yang sangat materialistis, konsumtif, jauh dari agama, dan kepemimpinan bangsa yang juga tidak bisa mewujudkan perasaan terayomi di kalangan masyarakat. Islam merupakan ideologi alternatif yang berbeda dengan peradaban Barat yang mewarisi semangat materialistik dan ateisme Yunani kuno.⁸ Sayangnya, semangat ini tidak sepenuhnya dipahami oleh para pemimpin di tengah masyarakat Islam sehingga banyak di antara mereka yang sibuk dengan kepentingan elitis hingga dekat dengan praktik korupsi.

Di kalangan revivalis, muncul keyakinan bahwa Islam adalah solusi pada setiap persoalan.⁹ Apalagi belajar dari sejarah mereka memahami bahwa perkembangan Islam sebagai ideologi terus relevan dalam berbagai perkembangan zaman, meskipun tidak jarang Islam tersebut “ditemukan” oleh masyarakat Barat. Karenanya, muncul semangat untuk melahirkan kembali budaya dan identitas diri untuk melegitimasi siapa Muslim yang sesungguhnya. Karena dasar dalam setiap pemikiran dan gerakan hanya berdasarkan Islam, akhirnya seringkali revivalisme memunculkan konflik dengan gerakan nasionalisme—sebagaimana yang terjadi dalam sejarah politik Islam di Indonesia.

Pada waktu itu, terjadi perdebatan hangat antara Soekarno dan Natsir berkaitan dengan nasionalisme dan Islam dalam politik

⁷ Raphael Demos, “The Neo-Hellenic Enlightenment (1750-1821),” *Journal of the History of Ideas* 19, no. 4 (1958): 523–541.

⁸ Samee-Ullah Bhat, “Life and Works of Abul Hasan ‘Ali Nadwi (RA): An Analytical Study,” *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 6, No. 1, (Lahore: University of Management and Technology, 2016).

⁹ Iik A. Mansurnoor, “Revivalism and Radicalism in Southeast Asian Islam: A Pattern or an Anomaly?,” *New Zealand Journal of Asian Studies*, 11, 1 (June 2009), 222.

di Indonesia. Menurut Soekarno, nasionalisme harus secara murni diimplementasikan dalam politik Indonesia, tanpa adanya campuran Islam. Bahkan jikapun ada nilai agama, maka itupun dalam gabungan ideologi Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis). Adapun pada sisi lain, Natsir menilai bahwa Islam dan nasionalisme tidak bisa diperdebatkan, bahkan justru saling menguatkan. Tanpa Islam, nasionalisme di Indonesia tidak akan ada dan tidak mungkin kuat.¹⁰

Peluang Revivalisme Islam

Berdasarkan berbagai data yang penulis kumpulkan maka terdapat beberapa peluang bagi perkembangan revivalisme Islam di Indonesia. Dengan beberapa faktor yang merupakan peluang tersebut, jika kesempatan ini dioptimalkan maka gerakan revivalisme Islam akan berlangsung masif. Faktor-faktor tersebut di antaranya sebagaimana penjelasan berikut:

Faktor Sejarah

Dalam hal ini, diakui bahwa keberadaan Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Karenanya, nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat menunjukkan Islam dan politik di Indonesia mempunyai keterkaitan yang cukup kuat. Bahkan ketika bicara tentang sejarah sebelum kemerdekaan, maka terdapat begitu banyak kerajaan Islam yang pernah tumbuh subur di Indonesia seperti Samudra Pasai, Perlak, Demak, Banten, Mataram, Goa Tallo, Cirebon, Banjar, Ternate Tidore, dan lain-lain.¹¹ Hal ini menggambarkan bahwa Islam mempunyai peran penting dan strategis bagi Indonesia. Ketika masa kemerdekaan, para ulama mempunyai peran besar untuk menggerakkan massa merebut kemerdekaan dengan teriakan takbir dan semangat jihad.

Dengan sejarah yang panjang tersebut, maka gerakan revivalisme Islam tahu persis bagaimana harus menempatkan diri dalam politik Indonesia. Bahkan jika dilihat lebih detail, maka terlihat bahwa gerakan revivalisme Islam di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan revivalisme Islam di Malaysia. Secara historis, mulainya kebangkitan

¹⁰ Anjar Nugroho, "Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler," *Afkaruna*, 9, no. 2 (2013), 129–147.

¹¹ Gonda Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia," *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)* 17, no. 1 (2013), 35–50.

Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1970. Dalam konteks ini, revivalisme Islam menjadi salah satu kekuatan dan warna baru dalam politik di dunia Islam.

Meskipun demikian, sejarah politik Indonesia menyepakati bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama melainkan dibangun atas dasar nasionalisme, patriotik, dan kemanusiaan. Indonesia merupakan negara yang multietnik dan multireligius, tetapi mereka tetap bersatu dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹² Bahkan dalam perkembangannya justru terjadi pembatasan terhadap berbagai kegiatan keislaman di Indonesia mengulangi pengalaman sejarah Islam di era Soekarno dan Soeharto. Oleh karena itu, ketika muncul kesempatan pada saat kekuasaan Soeharto tumbang, maka berbagai tekanan dan pembatasan yang selama ini dialami justru membuat gerakan revivalisme meningkat drastis pascareformasi.¹³

Akulturalisasi Melalui Lembaga Pendidikan

Banyaknya pondok pesantren sebagai media penyebaran ideologi keislaman masyarakat Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam gerakan revivalisme Islam di Indonesia. Pondok pesantren memiliki metode yang tepat dalam penyampaian misi keislaman. Dengan jumlah penganut mayoritas, Muslim di Indonesia membutuhkan lembaga yang dapat mengayomi, merangkul, dan tidak mengundang pertentangan. Bagi masyarakat Muslim Indonesia kiai memiliki status sosial yang terhormat.

Karena itu, berbagai keputusan yang diambil oleh masyarakat, terutama yang masih bersifat tradisional, seringkali dipengaruhi oleh pendapat yang disampaikan oleh kiai yang dihormati di sekitar mereka. Bahkan penghormatan terhadap para kiai ini, terutama di beberapa masyarakat tertentu seperti Madura, melebihi kehormatan mereka terhadap para pejabat negara.¹⁴

Budaya yang berkembang seperti ini juga memengaruhi karakter politik Indonesia. Ketika musim pemilu, biasanya para calon anggota dewan atau tokoh politik mulai berdatangan menarik simpati dari

¹²Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2016).

¹³Amy L. Freedman, "Political Viability, Contestation and Power: Islam and Politics in Indonesia and Malaysia," *Politics and Religion* 2, no. 1 (2009): 100–127.

¹⁴Oksiana Jatningsih, "Sosok Kiai dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017).

umat dengan mendatangi berbagai pondok pesantren. Dengan mendapatkan dukungan dari kiai, maka kemungkinan besar para santri dan masyarakat yang sering mengikuti kegiatan kiai tersebut juga akan mempunyai pilihan politik yang sama dengan sang kiai.

Islamisasi Kebijakan

Gerakan revivalisme Islam di Indonesia memiliki momentum ketika berbagai partai Islam yang ada mulai bergerak secara lebih profesional dalam menerapkan nilai-nilai keislaman secara lebih luas. Terkadang mereka tidak menampakkan simbol keislaman yang diusungnya, tetapi dalam praktiknya sebenarnya mereka sedang membawa nilai-nilai Islam. Pola yang seperti ini misalnya bisa terlihat dari gerakan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik berbasis organisasi Islam terbesar di Indonesia yang terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Dalam *platform* politik, kedua partai ini menyatakan bahwa mereka tidak menjadikan alasan agama (Islam) sebagai landasan, melainkan lebih kepada nilai-nilai kejujuran, antikorupsi, dan seterusnya yang tentu sepaham dengan semangat keislaman.

Di beberapa daerah, upaya menerapkan syariat Islam melalui Peraturan Daerah (PERDA) sudah mulai dilaksanakan. Dengan cara ini, berbagai ide dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik mulai mendapatkan nuansa keislaman. Hal ini misalnya terlihat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Solok, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Maros, Pamekasan, Gorontalo, Gowa, Bulukumba, Banjarmasin, Padang Pariaman, Banjar, Musi Banyuasin, dan lain-lain.¹⁵ Demikian juga dalam bidang ekonomi, mulai menjamurnya bank-bank dengan label syariah menjadi indikasi cukup masifnya gerakan Islamisasi di Indonesia, terlepas hal tersebut bersifat substantif atau hanya mengikuti keinginan pasar. Semangat untuk mewujudkan penerapan syariat Islam di beberapa tempat ini tidak terlepas dari pandangan kegagalan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan serius di tengah masyarakat.

Beberapa gerakan revivalisme Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebenarnya lahir sebagai antitesis dari sistem pemerintahan orde baru yang sekuler. Termasuk di dalamnya

¹⁵ Noorhaidi Hasan, "Islamic Militancy, Sharia, and Democratic Consolidation in Post-Suharto Indonesia", *RSIS Working Papers*, (Singapore: Nanyang Technological University, 2007).

berbagai persoalan lain seperti korupsi, materialistik, ketidakadilan, berkembangnya tindakan yang tidak bermoral, dan banyaknya kompromi yang dilakukan dengan kepentingan Barat. Oleh karena itu, gerakan ini bermaksud untuk membangun sistem politik Indonesia yang egaliter, demokratis, dan menerapkan nilai-nilai Islam.

Kondisi seperti ini bisa dijustifikasi oleh pendapat Norris dan Inglehart yang menjelaskan bahwa ternyata komitmen keberagamaan suatu masyarakat cenderung lebih tinggi di negara-negara yang mempunyai persoalan dengan ketimpangan ekonomi.¹⁶ Hal inipun sebenarnya senada dengan pendapat kelompok Marxis yang menilai bahwa ekonomi sebagai suprastruktur dalam masyarakat. Maksudnya bahwa berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya sangat terpengaruh oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam konteks ini, pengerahan massa yang bisa mengarah kepada ketidakstabilan politik akan lebih mudah dilakukan atas nama agama. Ketika sudah bicara agama, terkadang rasionalitas para pengikutnya menjadi berkurang. Itulah yang membuat revivalisme Islam mudah terjadi di negara-negara Muslim yang bermasalah ekonomi dalam pemerataan.

Tantangan Gerakan Revivalisme

Meskipun mempunyai berbagai peluang untuk semakin berkembang di Indonesia, tetapi gerakan revivalisme juga bukan tanpa masalah. Ada banyak persoalan yang menjadi tantangan bagi gerakan ini yang akan sangat memengaruhi bagaimana perkembangan revivalisme Islam di Indonesia ke depannya. Berbagai persoalan tersebut baik bersifat internal maupun eksternal dari gerakan revivalisme Islam itu sendiri. Berikut berbagai tantangan yang dihadapi oleh gerakan revivalisme Islam tersebut.

1. Tantangan Opini Publik

Jika diperhatikan, adanya tantangan opini publik ini sebenarnya disebabkan karena mispersepsi mereka terhadap isu radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat. Istilah radikalisme dan fundamentalisme atau konservatisme seringkali ditempatkan dalam satu bahasa yang sama, padahal mempunyai makna yang jauh berbeda. Bagi seorang penganut agama, keyakinan akan teks dalam ayat suci mereka

¹⁶ Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (Cambridge University Press, 2011).

merupakan suatu keniscayaan, bahkan keharusan. Namun dalam konteks ini, Islam sebagai suatu agama rahmat tentu tidak mengajarkan kekerasan kepada pemeluknya. Maka jika ada yang menjustifikasi kekerasan atas nama agama, maka alasan tersebut tidak bisa diterima. Sayang, terkadang muncul *framing* yang menempatkan agama menjadi korban dan alat politik bagi kelompok kepentingan tertentu.¹⁷

2. Belum Optimalnya Sarana Dialog Kebhinnekaan

Hal lain yang juga bisa menjadi tantangan bagi gerakan revivalisme Islam di Indonesia adalah sikap latah sebagian masyarakat yang sudah mulai terjebak dengan sikap tergesa-gesa mengklaim tanpa melakukan dialog terlebih dahulu. Bahkan mereka yang menuntut dibubarkannya berbagai lembaga yang mempunyai indikasi melakukan kekerasan juga terjebak pada perbuatan-perbuatan dengan cara kekerasan. Di sinilah kiranya memperbanyak gerakan dialog di tengah masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkembang perlu dilakukan.

Dialog perlu menjadi budaya di tengah masyarakat dalam merespons apapun termasuk terhadap kelompok yang dikenal masyarakat sebagai kelompok radikal. Langsung merespons apa yang mereka lakukan dengan jalur kekerasan rasanya bukan merupakan hal yang bijak.

Jika berbagai upaya dialog ini belum berhasil dilakukan, maka tentu proses hukum perlu dilakukan dengan adil. Selama ini tidak jarang kekerasan yang berkembang di tengah masyarakat terjadi karena jalur formal yang berjalan dinilai tidak bisa mengayomi kepentingan semua pihak. Dalam konteks ini, ketika demokratisasi yang dikembangkan tidak disertai dengan penegakan hukum yang berkeadilan, maka demokrasi tersebut dinilai berada pada posisi rawan.¹⁸

3. Penurunan Dukungan dan Perpecahan

Perkembangan dukungan masyarakat terhadap gerakan revivalisme Islam, terutama partai Islam di Indonesia dari tahun ke tahun mulai mengalami penurunan. Meskipun pada awal reformasi citra Islam sebagai solusi bagi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat masih bagus, tetapi pelan-pelan masyarakat

¹⁷ Azyumardi Azra, "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths," *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, 2003, 39–57.

¹⁸ Yew Lee Kuan, "Islam and Democracy in Southeast Asia," *FORBES* 174, no. 2 (2004): 39.

menganggap partai Islam tidak ada bedanya dengan partai pragmatis lainnya. Bahkan dukungan terhadap partai nasionalis menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan terhadap partai Islam.

Hal ini juga dipengaruhi oleh pola hubungan antara satu gerakan Islam dengan lainnya yang belum optimal dikelola. Sebagaimana agama yang lainnya, Islam tidak bisa dilihat secara monolit karena kenyataannya pemaknaan Islam sudah diterjemahkan ke dalam berbagai tafsir yang berbeda. Jika dalam hal tafsir saja sudah demikian, maka akan sulit untuk mempersatukan mereka dalam aspirasi politik.¹⁹

Dalam konteks Indonesia saja, interpretasi tentang Islam terkadang menjadi sesuatu yang unik, misalnya dengan kemunculan istilah Islam lokal dan Islam transnasional. Hal ini bisa dipahami karena di Indonesia, Islam telah melalui sejarah yang panjang bersama kehidupan masyarakat yang multietnik, multikultural, dan sekian banyak perbedaan lainnya.²⁰

Perpecahan antara gerakan revivalisme Islam yang satu dengan lainnya cukup kentara. Misalnya terjadi pada kelompok yang menerima demokrasi dan yang menolaknya. Atau juga pada kelompok yang ingin memahami Islam secara substantif dengan kelompok yang menginginkan pemahaman Islam secara formalistik. Satu kelompok menginginkan Islam dalam artian nilainya yang dikembangkan, sementara pihak lain lebih menekankan pada aspek penerapan syariat Islam. Tidak jarang kelompok formalistis ini terjebak kepada tindak kekerasan dan ekstremis sehingga memunculkan kesan bahwa mereka adalah kelompok teroris.

4. Profesionalisme Gerakan Revivalisme Islam

Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masa depan gerakan revivalisme Islam di Indonesia terkait profesionalisme kelompok Islam, terutama yang berhasil masuk dalam struktur pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang langsung dihadapi oleh masyarakat. Dalam realitasnya, banyak di antara kelompok Islam yang belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya. Kelompok gerakan revivalisme Islam tadi seringkali dinilai belum mempunyai *blue print* yang jelas. Hal ini pada akhirnya memberikan pengaruh signifikan

¹⁹ Luthfi Assyauckanie, "Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia," *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 20 (2004), 32–46.

²⁰ Hugh Goddard, "Islam and Democracy," *The Political Quarterly* 73, no. 1 (2002), 3–9.

bagi masa depan gerakan revivalisme Islam di Indonesia.

Kondisi ini bahkan tetap terjadi ketika kekuatan gerakan revivalisme Islam tadi sudah mulai bersinggungan dengan pemerintahan. Tidak jarang gerakan revivalisme Islam Indonesia kesulitan terkait bagaimana seharusnya mereka memosisikan diri dalam pemerintahan. Apakah mereka harus berada pada posisi oposisi atau justru harus ikut terlibat dalam pemerintahan. Kondisi ini pernah dialami oleh PKS yang pada akhirnya memilih untuk berkoalisi dengan pemerintah pada beberapa kali pemilu di Indonesia. Dengan alasan bahwa mereka membutuhkan pengalaman duduk di kursi pemerintahan agar mengetahui riil persoalan yang terjadi di lapangan. Selain itu, dalam konteks pencitraan, kebijakan ini penting diambil untuk menggambarkan bahwa partai Islam juga mampu bekerja sama secara produktif dengan berbagai elemen dalam spektrum politik.

Untuk kepentingan pencitraan tersebut, PKS akhirnya mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka.²¹ Secara perlahan PKS mulai menominasikan calon anggota legislatif yang berasal dari kelompok non-Muslim, bahkan beberapa di antara mereka terpilih. Terbukti dengan cara ini mereka mampu meraup dukungan yang lebih besar daripada ketika masih terkesan eksklusif, apalagi pada saat namanya masih Partai Keadilan (PK) di tahun 1999. Sekarang ini jumlah aktivis yang merupakan anggota PKS sudah mencapai angka lebih dari 500 ribu kader.

Meskipun demikian, di samping mendapatkan jumlah kader yang lebih banyak, dari aspek militansi, PKS cenderung mengalami penurunan pesat. Tidak sedikit yang awalnya menaruh kepercayaan besar kepada PKS mulai mengundurkan diri dari partai ini. Lebih dari itu, kebijakan menjadi partai terbuka ini juga berisiko besar bagi PKS sebagai salah satu gerakan revivalisme Islam di Indonesia.

5. Sekularisme

Semakin berkembangnya budaya sekularisme dan rasionalisme di tengah masyarakat juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masa depan gerakan revivalisme Islam. Dalam teori modernisasi atau sekularisasi yang selama ini berkembang, kemunduran agama dipahami berjalan seiring dengan peningkatan sekularisme dan politik

²¹ Agus Wahyudi, "PKS dan NU (Studi Kasus Tentang Penguatan Jejaring PKS dalam Menembus Basis NU di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum 2009)" (Universitas Airlangga, 2013).

rasional. Dengan alasan ini pula, Turki pernah punya pengalaman ingin mengembangkan sekularisme dalam politiknya.²²

Hal ini terjadi karena selama ini agama seringkali hanya dipahami sebagai suatu bentuk dogma yang jauh dari metode ilmiah. Oleh karena itu, ketika kemudian para aktivis gerakan revivalisme Islam mampu menampilkan Islam dalam bentuk penjelasan yang ilmiah dan bisa diterima oleh ilmu pengetahuan, maka peluang untuk eksis dalam kehidupan politik Indonesia masih tersisa. Hanya saja para pemikir politik dan ilmuwan sosial telah memprediksi bahwa pada abad ke-19 dan ke-20, kemunduran posisi agama dan peningkatan pemahaman rasional dan sekuler berkembang secara signifikan. Bahkan Hume, Hegel, Marx, dan Weber, mereka telah menjelaskan bahwa manusia modern cenderung lebih terdidik, tinggal di kota, dan membebaskan diri mereka dari ikatan agama.²³

Ternyata kondisi serupa telah terjadi di Indonesia. Pada satu sisi Indonesia masih menempatkan Pancasila dengan nilai keagamaan pada sila pertama sebagai hal yang sangat penting, di sisi lain *westernisasi* sangat kental dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini pula yang kemudian pelan-pelan menyingkirkan posisi Islam dalam politik Indonesia, karena Islam seringkali dipersepsikan sebagai suatu ideologi yang tidak sesuai dengan demokrasi.

Di era ini terjadi peningkatan budaya Islam di berbagai level dan bidang kehidupan masyarakat. Jika di era Orde Baru, hal-hal yang berbau Islam begitu sulit dimunculkan di tengah masyarakat, pascareformasi hal tersebut menjadi biasa, misalnya dengan menyebarnya ucapan salam, berpakaian secara Islam, penggunaan sistem ekonomi syariah, budaya pengajian, dan membaca al-Qur'an.

Hal ini berkembang tidak hanya pada level formalitas, melainkan telah menjadi indikasi meningkatnya pemahaman Islam secara budaya yang selaras dengan kehidupan masyarakat. Terkait eksistensi partai politik yang mengatasnamakan agama, masyarakat sudah mulai bisa membedakan mana yang berjuang untuk rakyat atau sekadar menggunakan jargon agama. Masyarakat sudah mulai berusaha untuk mendukung partai yang betul-betul mendukung posisi dan kepentingan mereka. Bagi mereka, nilai-nilai agama harus menjadi bagian penting dalam praktik politik di Indonesia.

²²E. Fuat Keyman, "Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey," *Theory, Culture & Society* 24, no. 2 (2007): 215–234.

²³George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Modern Sociological Theory*, (California: SAGE Publications, 2017).

Penutup

Reformasi telah memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada berbagai gerakan revivalisme Islam di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita mereka di Indonesia. Terbukanya ruang kebebasan ini menjadi salah satu peluang bagi revivalisme Islam untuk semakin menunjukkan eksistensi mereka dalam menawarkan solusi alternatif bagi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Selain itu, sejarah Islam yang sudah lama dan mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia merupakan peluang lainnya yang sangat penting. Apalagi keadaan ini juga didukung oleh berbagai lembaga pendidikan yang mendukung semangat dan nilai-nilai Islam, serta kebijakan Islamisasi yang berkembang di beberapa tempat di Indonesia.

Meski demikian gerakan revivalisme Islam menghadapi tantangan serius. Di antara beberapa tantangan tersebut adalah pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung revivalisme Islam. Sejauh ini masih sering terjadi misinterpretasi tentang revivalisme Islam karena ruang dialog dalam kebhinekaan untuk menampilkan Islam dengan wajah yang lebih membumi belum sepenuhnya tercapai.

Seringkali Islam masih ditampilkan dengan cara tradisional yang membuat orang kurang yakin bahwa Islam mampu menawarkan solusi yang profesional. Akibatnya, dalam hal politik gerakan revivalisme Islam belum mendapatkan dukungan yang signifikan di tengah masyarakat. Apalagi warna perpecahan antara satu gerakan Islam dengan lainnya masih sangat kentara.

Dengan demikian, upaya gerakan revivalisme Islam untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman menjadi perkara yang sangat penting dilakukan. Jika hal ini tidak bisa dilakukan dengan baik, maka sangat mungkin revivalisme Islam di Indonesia hanya sekadar mimpi yang sulit diwujudkan.[]

Daftar Pustaka

- Arifianto, Alexander Raymond. 2017. "Banning Hizbut Tahrir Indonesia: Freedom or Security?" dalam *RSIS Commentary*, No. 099. Singapore: Nanyang Technological University.
- Aspinall, Edward, and Greg Fealy. 2013. *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouc*. Australia: ANU Press.

- Assyaukanie, Luthfi. 2004. "Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia", *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, Vol. 20, No. 2. Copenhagen: Asia Research Centre.
- Azra, Azyumardi. 2003. "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths", in Kumar Ramakrishna and See Seng Tan (Eds.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies and World Scientific.
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey* Vol. 44, No. 5. Berkeley: University of California.
- Berger, Peter L. 1999. "The Desecularization of the World: A Global Overview," *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Michigan: W.B. Eerdmans.
- Bhat, Samee-Ullah. 2016. "Life and Works of Abul Hasan 'Ali Nadwi (RA): An Analytical Study", *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 6, No. 1. Lahore: University of Management and Technology.
- Demos, Raphael. 1958. "The Neo-Hellenic Enlightenment (1750-1821)", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 19, No. 4. United States: University of Pennsylvania Press.
- Esposito, John L. 1999. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* USA: Oxford University Press.
- _____. 2015. "Islam and Political Violence", *Religions*, Vol. 6, No. 3. Basel: MDPI AG.
- Freedman, Amy L. 2009. "Political Viability, Contestation and Power: Islam and Politics in Indonesia and Malaysia", *Politics and Religion*, Vol. 2, No. 1. Cambridge: The American Political Science Association (APSA)/Cambridge University Press (CUP).
- Goddard, Hugh. 2002. "Islam and Democracy", *The Political Quarterly*, Vol. 73, No. 1. London: Deborah Mabbett, Department of Politics, Birkbeck University of London.
- Hasan, Noorhaidi. 2006. *Laskar Jihad*. Ithaca: SEAP Publications.
- _____. 2007. "Islamic Militancy, Sharia, and Democratic Consolidation in Post-Suharto Indonesia", *RSIS Working Papers*. Singapore: Nanyang Technological University.
- Ichwanuddin, Wawan. 2016. "Pola dan Kecenderungan Studi Konflik di Indonesia: Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus

- Aceh dan Ambon", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 8, No. 1. Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. "Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia", *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1. Surabaya: Progam Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Jatiningsih, Oksiana. 2017. "Sosok Kiai dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Keyman, E. Fuat. 2007. "Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey", *Theory, Culture & Society*, Vol. 24, No. 2. London: University of London.
- Lestari, Gina. 2016. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 1. Malang: HKn FIS Universitas Negeri Malang.
- Madinier, Remy, and Andrée Feillard. 1999. "At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Split between the Nahdlatul Ulama and the Masyumi in Retrospect", *Studia Islamika*, Vol. 6, No. 2. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Mardatillah, Fuadi. 1997. "Intellectual Responses to the Establishment of Matan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 1990-1995," *Tesis*. Montreal: McGill University.
- Nasr, Seyyed Vali Reza. 1995. "Democracy and Islamic Revivalism", *Political Science Quarterly*, Vol. 110, No. 2. New York: Academy of Political Science.
- Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. 2011. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Anjar. 2013. "Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler", *Afkaruna*, Vol. 9, No. 2. Yogyakarta: Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramage, Douglas E. 1997. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. United Kingdom: Psychology Press.

- Ritzer, George, and Jeffrey Stepnisky. 2017. *Modern Sociological Theory*. California: SAGE Publications.
- Wahyudi, Agus. 2013. "PKS dan NU (Studi Kasus tentang Penguatan Jejaring PKS dalam Menembus Basis NU di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum 2009)", *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Yazid, Syaifulloh. 2017. "Melacak Proyek Revivalisme dalam Gerakan Fundamentalisme Islam", *KALAM*, Vol. 11, No. 1. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
- Yew, Lee Kuan. 2004. "Islam and Democracy in Southeast Asia", *Forbes*, Vol. 174, No. 2. New York: Forbes Magazine.
- Yousif, Ahmad F. 2004. "Islamic Revivalism in Malaysia: An Islamic Response to Non-Muslim Concerns", *American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 21, No. 4. United States of America: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Yumitro, Gonda. 2013. "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia", *JSP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, Vol. 17, No. 1. Yogyakarta: FISIPOL UGM.